

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP  
PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA  
( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:  
1612/Pid.B/2018/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memnuhi dan melengkapi tugas**

**Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum dengan Kekhususan**

**HUKUM PIDANA**



**Disusun Oleh:**

**MUFLIHATUN NIPMAH**

**NIM: 2015-20-008**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN 2019**

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP  
PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA  
( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:  
1612/Pid.B/2018/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memnuhi dan melengkapi tugas**

**Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum dengan Kekhususan**

**HUKUM PIDANA**



**Disusun Oleh:**

**MUFLIHATUN NIP'MAH**

**NIM: 2015-20-008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAAN  
AGAMA**

**( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:  
1612/Pid.B/2018/PN.MDN)**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**

Oleh:

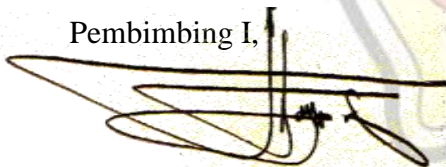
Nama: MUFLIHATUN NI'MAH

NIM:201520008

Kudus, 2 Agustus 2019

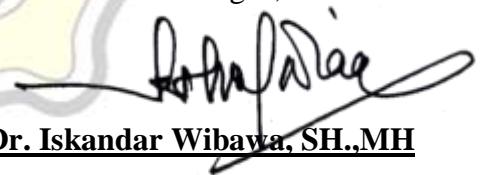
Disetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Hidayatullah, SH., MH**

Pembimbing II,



**Dr. Iskandar Wibawa, SH., MH**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr. Sukresno, SH., Mhum**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFLIHATUN NI'MAH

Nim :2015-20-008

Alamat : Desa Besito rt 02 rw 05 Gebog Kudus

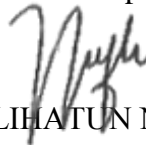
Judul Skripsi : Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap  
Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 2 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



MUFLIHATUN NI'MAH

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Di Indonesia profesi hukum sangatlah beragam, salah satunya merupakan profesi hakim, jaksa, advokat, notaris dan sebagainya. Akan tetapi banyak masyarakat disekitar kita yang menyimpulkan bahwa profesi tersebut hanyalah kedok untuk memanipulasi. Tapi ketahuilah disini masih banyak yang menggeluti profesi hukum yang masih mengutamakan kejujuran dan keadilan bukan hanya semata-mata mencari uang.

### **Motto:**

Lupakan kebaikan yang pernah kamu lakukan pada orang lain, tapi jangan sekalinya melupakan kebaikan orang lain kepadamu. Dan lupakan keburukan yang pernah orang lain lakukan kepadamu, tapi jangan pernah lupakan keburukan yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain.

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Ibuku Sri Kantiningsih dan Bapakku Moch. Zaeni
3. Kakak-kakakku tercinta
4. Alifah Normassari, Maria P. Utami, SH dan Nuruz Zahroh DSN, SH.
5. POSITIF (Pro Aksi Peduli Aktif)
6. FH UMK ANGKATAN 2015
7. TIM KKN UMK Desa Kebonsawahan Tahun 2018
8. BEM FH UMK Tahun 2016/2017 dan 2017/2018
9. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:6162/Pid.B/2018/ PN.Mdn). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam oenyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Sukresno, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Hidayatuallah, SH.MH selaku dosen pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Iskandar Wibawa, SH.MH selaku dosen pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga sripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pemabca pada umumnya.

Kudus, 2 Agustus 2019



MUFLIHATUN NI'MAH

## **ABSTRAK SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN/Mdn) bertujuan mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan.

Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.

Kata kunci : Fatwa MUI, Penodaan Agama, Suara Azan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Perumusan Hipotesis .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia.....	15



a. Pengertian Agama .....	17
b. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama .....	18
c. Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama .....	20
2. Penafsiran Hukum oleh Hakim .....	21
a. Pengertian Penafsiran Hukum.....	21
b. Metode Penafsiran Hukum.....	21
3. Sumber Hukum di Indonesia .....	24
a. Pengertian Sumber Hukum .....	24
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .....	32
B. Pendekatan Masalah .....	32
C. Bahan Hukum .....	33
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	34
E. Metode Analisis Data .....	35

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Fatwa MUI menurut Doktrin, Surat atau Keterangan Ahli .....	37
B. Kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dijadikan Hakim dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) .....	44

1. Pembuktian kualifikasi delik pidana pada Pasal 156a huruf a KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn .....	49
2. Analisis unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP .....	52

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

## DAFTAR PUSTAKA



